

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penunjang yang menyebabkan SiLPA itu terjadi dan cukup fluktuasi di tiga tahun periode anggaran yakni antara lain:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya SiLPA.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum Optimal dikarenakan, mayoritas latar belakang belakan pendidikan adalah SLTA/ Sederajat, akibatnya Perangkat Desa Sadi mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Kinerja Aparat Desa dalam menyusun APBDes kurang baik sehingga kedepannya Pemerintah Desa Sadi perlu menjadwalkan agenda rapat untuk menyusun dan penetapan APBDes tepat waktu dan juga meningkatkan kualitas Sumbere Daya Manusia sehingga kerja tidak saling menunggu atau memberikan satu orang sendiri yang mengerjakan semua administrasi.

Partisipasi Masyarakat berperang dalam proses pembangunan desa karena masyarakat harus pandai memperhitungkan program kerja mana yang diprioritaskan demi kemajuan bersama. Masyarakat menjadi pihak paling mengetahui kondisi dan kebutuhan di daerahnya sehingga dengan keikut sertakan masyarakat akan mencapai kemajuan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Pemerintah Desa Sadi pada tahap perencanaan atau penganggaran dan pelaksanaan terdapat masalah karena proses pengerjaannya tidak sesuai dengan agenda kerja

yang sudah disepakati bersama karena adanya Penghematan Belanja dan tidak terlaksana beberapa program/ kegiatan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan pada Desa Sadi Selama Periode 2019-2021. Hal ini dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa sehingga adanya beberapa program/ kegiatan tidak berjalan sesuai perencanaan awal yang ditetapkan, selain itu ada juga beberapa kegiatan yang berjalan namun dalam pelaksanaannya realisasi belanjanya lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan. Dan Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa yang tidak terlaksana

2. Dampak SiLPA Bagi Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Dimana Masyarakat merasa kecewa karena pemerintah tidak memenuhi pembangunan rumah layak huni, Pengadaan Rontok Padi dan Bak Penampung Air Bersih yang sudah dijanjikan oleh pemerintah desa dengan berbagai alasan diantaranya karena perubahan harga satuan bahan tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan.

Aparat pemerintah desa masih perlu diberikan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan cara pertanggungjawabkan keuangan desa. Pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa harus didukung dengan sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa masih jadi kendala terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak terkecuali tata kelola pemerintahan desa.

6.2 Saran

Penulis Memberi saran kepada beberapa pihak dalam mengatasi terjadinya SiLPA di Desa Sadi:

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan kepada perangkat desa pada pemerintah desa yang ada di kecamatan tasifeto timur, agar dapat meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, agar laporan pertanggung jawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dan tidak mengalami keterlambatan kegiatan yang tidak saat penyusunan pelaporan, karena apabila penyusunan rencana pelaporan terlambat maka dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses pencairan dana desa dan bantuan lain dari pemerintah kabupaten sehingga menyebabkan adanya program/ kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan.
2. Bagi Pemerintah Desa Sadi untuk terus meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan dan administrasi desa secara berkala. Harus dibuatkan skejul atau jadwal secara teratur agar proses penyusunan perencanaan kegiatan penetapan APBDes, pelaksanaan APBDes dan pelaporan APBDes tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pengerjaan program fisik maka perlu ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia material baik lokal maupun non lokal. Perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan,

pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Pemerintah Kecamatan Tasifeto Timur dalam hal ini Rekomendasi pencairan dana dari kecamatan tidak perlu kolektif karena dapat menghambat proses kegiatan di desa-desa yang sudah direncanakan. Dalam pembuatan rekomendasi pencairan dana tidak perlu ada aturan lokal misalnya laporan belum masuk maka tunjangan aparatur Pemerintahan Desa ditahan. Kegiatan evaluasi APBDes harus tepat waktu sehingga tidak mempersulit aparatur desa dalam menyusun dan merencanakan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti Ivo. 2016, *Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014-2015. (Studi di Pemerintah Desa Se-Kabupaten Belitung)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Abdullah 2013. *Defisit/Surplus dan SiLPA dalam Anggaran Daerah*
- Hotimah, Siti 2015. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Alokasi Desa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dan Desa Sesuai PP RINo.22 Tahun 2015*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit ERLANGGA
- Opat Adrianus 2020. *Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pengelolaan APBDes pada Pemerintah Desa Taekas Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2015-2019*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa /Muhamad Mu'iz Raharjo*;Editor, Tarmizi—Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rani Yulia.2019. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Kinerja Keuangan Daerah pada 38Kabupaten dan Kota Se-jawa Timur Tahun 2012-2016*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya Malang.
- Ratna, Ikhwani 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau*.Jurnal El- Rayasah, VI 9. No 1 2018. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Sari Permata Shinta. 2021, *Determinasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa. (Kabupaten Sukoharjo)*. Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Widjaja.2004. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wijaya, David. 2018, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Gava Media
- Winarni Ninuk Sri 2013. *Pengaruh Faktor-faktor Aspek Manajemen Keuangan Daerah terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah*. (Yogyakarta): Universitas Gadjah Mada.